

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia setelah memasuki masa reformasi berjalan dengan baik. Prinsip demokrasi mulai diterapkan kembali. Pemerintahan pusat sebelumnya mulai ditinggalkan, seperti terlihat pada penerapan otonomi daerah. Pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan tujuan menyelenggarakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya (Moenta & Pradana, 2018).

Pengelolaan pelaporan keuangan merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan yang sangat mendasar dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut di atas mencakup kebebasan untuk mengerahkan sumber pendanaan dan menentukan arah, maksud dan tujuan penggunaan anggaran.

Pengelolaan keuangan negara merupakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah. Dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepemilikan Pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara.

Yang dimaksud dengan transparansi adalah pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat atas dasar bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan komprehensif mengenai akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. peraturan. Beliau bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang diberikan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala (SAP, 2016).

Hasil dari akuntansi pemerintahan adalah pelaporan keuangan bertujuan umum. Laporan keuangan bertujuan umum adalah laporan proses identifikasi, pengukuran, dan pencatatan transaksi ekonomi (keuangan) entitas akuntansi di lingkungan pemerintah daerah dan digunakan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan penyusunan dan penyampaian bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dengan tepat. Dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang berlaku umum.

Audit internal merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak dari manajemen internal yaitu auditor perusahaan untuk memeriksa catatan akuntansi dan keuangan perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal biasanya lebih detail dibandingkan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Sedangkan pengertian audit menurut Institute of Internal Auditors (IIA) adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti terkait berbagai peristiwa ekonomi (informasi) guna menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditentukan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Agoes, 2012:13)

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Auditor harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan untuk memahami kinerja yang digunakan. Ia juga harus memenuhi syarat untuk mengetahui jenis dan jumlah bukti yang perlu dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang benar setelah memeriksa bukti. Auditor juga harus memiliki pikiran yang independen. Kompetensi orang yang melakukan audit tidak akan ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Audit internal berperan sebagai penilai independen yang dibentuk oleh perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan. Kehadiran fungsi audit internal pada suatu perusahaan dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Peran audit internal tidak hanya sebatas memantau keuangan perusahaan, namun juga memberikan bimbingan, konsultasi, dan penelaahan laporan keuangan.

Kinerja karyawan bukan sekedar informasi untuk promosi atau penentuan gaji bagi perusahaan. Namun bagaimana perusahaan dapat memotivasi karyawan dan mengembangkan rencana untuk memperbaiki penurunan kinerja yang dapat dihindari? Kinerja pegawai hendaknya dievaluasi dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang baik kepada pegawai dalam merencanakan karirnya ditinjau dari kelebihan dan kekurangannya, sehingga perusahaan dapat menetapkan gaji, menawarkan promosi dan dapat melihat perilaku pegawai. Penilaian kinerja dikenal dengan istilah *performance rating*.”.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **”Analisis audit keuangan internal terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Kecamatan Klakah Lumajang.”**

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi pada analisis audit keuangan internal terhadap kinerja pegawai di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang pada tahun 2023.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan audit internal yang diterapkan oleh kantor Kecamatan Klakah Lumajang ?
- 2) Apakah pelaksanaan audit internal sudah efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kecamatan Klakah Lumajang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai prosedur pelaksanaan audit internal di kantor Kecamatan Klakah Lumajang.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan audit internal sebagai salah satu upaya dalam penilaian kinerja pegawai di kantor Kecamatan Klakah Lumajang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmiah dan praktis tidak hanya bagi penulis sendiri, namun juga bagi lembaga pendidikan dan pihak lain yang mungkin berkepentingan.

Berikut ini peneliti sampaikan beberapa manfaat dari penelitian:

1) Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sumber daya manusia khususnya dalam menguji analisis audit keuangan internal dan kinerja pegawai, sehingga dapat diperjelas apakah hasil penelitian ini mendukung atau menolak penelitian sebelumnya.

2) Manfaat Praktis

Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar sarjana di ITB Widya Gama Lumajang, dalam menerapkan dan membandingkan teori perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. Untuk lebih

memahami dan memperluas manajemen pemasaran nyata dalam pemasaran di pasar nyata.

Bagi ITB Widya Gama Lumajang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan bagi perbendaharaan perpustakaan ITB Widya Gama Lumajang dan dapat memberikan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan analisis audit keuangan internal dan kepegawaian.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memotivasi peneliti lain untuk melakukan penelitian terkait topik tersebut.

